



**RENCANA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH
TAHUN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH
TAHUN 2021**

BUPATI GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 42 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan seluruh Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
 - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 590);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 11 Seri E);

3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang memuat sasaran, program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan prioritas, tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
7. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

- (1) Renja PD Tahun 2022 disusun berpedoman pada RKPD Tahun 2022, diselaraskan dengan rencana kerja kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian dan renja PD Provinsi.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan Renja PD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Januari sampai dengan Desember Tahun 2022.

BAB II

SISTEMATIKA RENJA PD

Pasal 3

- (1) Renja PD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 pada masing-masing Perangkat Daerah disusun dengan sistematika:

Bab I Pendahuluan

Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai landasan penyusunan Rencana Kinerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan alat evaluasi kinerja PD Tahun 2022.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENJA PD

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD.
- (2) Kepala PD melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renja PD kepada Bupati melalui kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal, 28 Juli 2021

BUPATI GUNUNGKIDUL, *[Signature]*



SUNARYANTA *[Signature]*

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal, 28 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

[Signature]
DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2021 NOMOR 42

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II	
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Rencana Strategis	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat	14
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi....	17
2.4 Review terhadap Rancangan Kerja Pemerintah Daerah	20
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	26
BAB III	
TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH	27
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	27
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat	27
BAB IV	
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH.....	30
BAB V	
PENUTUP	49

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah sampai dengan Tahun 2020	7
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Terhadap Renstra PD tahun 2016-2021 Kabupaten Gunungkidul	15
Tabel 2.3 Proyeksi Capaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Terhadap Renstra PD tahun 2021-2026 Kabupaten Gunungkidul	16
Tabel 2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022 Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul	21
Tabel 3.1 Prioritas dan Sasaran Inspektorat Daerah	28
Tabel 3.2 Tujuan Inspektorat Daerah	28
Tabel 3.3 Sasaran Inspektorat Daerah	29
Tabel 3.4 Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah	29
Tabel 4.1 Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Inspektorat Daerah tahun 2022	30
Tabel 4.2 Prioritas, Sasaran, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022	32
Tabel 4.3 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022.....	36
Tabel 4.4 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023	37

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

RENCANA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Rencana Kerja

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Perangkat Daerah (PD) menyiapkan Rencana Kerja PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Kerja PD yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) Tahun. Rencana kerja dimaksud memuat program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan. Rencana Kerja PD ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah.

Tahun 2022 merupakan tahun pertama dalam Periode RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 sehingga Renja PD Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada Rancangan RPJMD dan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Program dan kegiatan dalam Renja PD diarahkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan tetap memperhatikan usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui mekanisme musrenbang.

Seperti yang telah termuat dalam Rancangan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul, bahwa untuk mewujudkan visi, misi yang telah ditetapkan setiap Perangkat Daerah (PD) harus merencanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Proses penyusunan rencana program dan kegiatan yang biasa disebut dengan perencanaan kinerja kegiatan merupakan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah (PD) melalui berbagai kegiatan Tahunan. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.1.2 Proses Penyusunan Rencana Kerja

Proses penyusunan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2022 telah melewati tahap-tahap seperti yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*Stake holder*) yang ada, baik secara formal maupun non formal.

Garis besar proses penyusunan Renja Inspektorat Daerah adalah :

1) Tahap Persiapan

Kegiatan penyusunan rancangan Renja Inspektorat dilakukan sebelum Rancangan Awal RKPD diterima. Langkah-langkah pada kegiatan persiapan mencakup identifikasi para pemangku kepentingan, pembentukan tim penyusun Renja PD, penyiapan kelembagaan forum PD, pengisian formulir (isian), penyusunan rencana kerja tim untuk penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

2) Tahap Kegiatan Analisis dan Pengkajian Dokumen

Kegiatan analisis dan pengkajian dokumen meliputi kajian terhadap rancangan RKP Nasional dan RKPD Kabupaten, review RPJM Nasional dan RPJM Provinsi, kajian terhadap Rancangan RPJM Daerah dan Rancangan Renstra PD, kajian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan PD, meminta/menerima rancangan RKPD secara resmi dari Bappeda.

3) Tahap Kegiatan Penyusunan Rancangan Dokumen Renja

Kegiatan ini dilaksanakan setelah PD melaksanakan forum PD dan mengacu pada dokumen RKPD.

1.1.3 Keterkaitan Renja dengan Renstra

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Tahun 2022 berpedoman kepada Rancangan Renstra Inspektorat Daerah. Rancangan Renstra Inspektorat Daerah tahun 2021-2026 memuat arah kebijakan teknis dan rencana program sesuai bidang kewenangan atau fungsi tugas pemerintahan untuk jangka waktu tertentu yang disusun oleh Perangkat Daerah dan berkoordinasi dengan Bappeda.

1.1.4 Keterkaitan Renja dengan Renja Kementerian/Lembaga dan Renja Inspektorat Daerah.

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 memperhatikan dan menindaklanjuti visi, misi, arah kebijakan teknis dan rencana program dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, BPK, BPKP dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.2. Landasan Hukum

- 1.2.1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
- 1.2.2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 1.2.3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 1.2.4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 1.2.5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- 1.2.6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 590);
- 1.2.7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 1.2.8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 1.2.9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
- 1.2.10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 - 2025;
- 1.2.11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah;

- 1.2.12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan oleh Inspektorat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- 1.2.13. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 050/0237 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah adalah :

- 1.3.1 Sebagai acuan dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja, dan dana indikatif rencana kerja yang sesuai dengan program prioritas;
- 1.3.2 Sebagai acuan dalam penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran serta perkiraan maju berdasarkan program prioritas Inspektorat Daerah;
- 1.3.3 Sebagai tolok ukur keberhasilan program/kegiatan yang dilaksanakan; dan
- 1.3.4 Dasar penilaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyajian Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 dengan sistematika sebagai berikut:

- | | |
|---------|---|
| BAB I | PENDAHULUAN |
| | 1.1 Latar Belakang |
| | 1.2 Landasan Hukum |
| | 1.3 Maksud dan Tujuan |
| | 1.4 Sistematika Penulisan |
| BAB II | HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH |
| | 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra |
| | 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah |
| | 2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah |
| | 2.4 Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah |
| | 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat |
| BAB III | TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH |
| | 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi |
| | 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah |
| BAB IV | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH |
| BAB V | PENUTUP |
| | 5.1 Catatan Penting |
| | 5.2 Kaidah Pelaksanaan |
| | 5.3 Rencana Tindak Lanjut |

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Rencana Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 47 Tahun 2020 serta Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor 160/DPPA/2020 tentang Dokumen Pergeseran Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-PD) Tahun Anggaran 2020 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul mendapat alokasi dana sejumlah Rp7.112.718.805,00 (tujuh miliar seratus dua belas juta tujuh ratus delapan belas ribu delapan ratus lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Jumlah program = 7 program
- Jumlah kegiatan = 20 kegiatan
- Jumlah Anggaran = Rp7.112.718.805,00

dengan rincian berikut :

- Belanja Langsung = Rp3.555.104.220,00
- Belanja Tidak Langsung = Rp3.557.614.585,00

Tingkat penyerapan keuangan Inspektorat Daerah tahun 2020 sebesar 89,18% sedangkan untuk indikator kinerjanya sebesar 98,35%. Hal yang menjadikan catatan bahwa ada beberapa kegiatan yang tidak dapat mencapai kinerja sesuai yang direncanakan, yang melibatkan lintas SKPD terkait dengan pengembangan tindak lanjut hasil pengawasan baik internal maupun eksternal dan Pusdiklat seperti berikut:

1. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur, terkait Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (menyesuaikan jadwal panggilan dan informasi dari Pusdiklat Jakarta) dan harus berkoordinasi dengan pihak lain seperti Pusat Pembinaan JFA selaku pihak penyelenggara;
2. Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi, hal ini disebabkan karena adanya wabah pandemi *Covid-19* yang dimulai pada akhir bulan Maret 2020 sampai saat ini sehingga banyak koordinasi atau pelaksanaan rapat menggunakan Tehnologi Informasi melalui *zoom meeting*;
3. Adanya ketugasan mendesak yang terkait dengan kebijakan pimpinan atau perintah dari Pusat terkait percepatan penanganan *Covid-19*. Namun demikian secara umum pelaksanaan kegiatan sampai akhir tahun telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan tidak ditemui kendala berarti dalam pelaksanaannya.

Dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul pada dasarnya semua program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Adapun kebijakan atau tindakan yang diambil untuk mengatasi faktor yang mempengaruhi pencapaian target kinerja antara lain :

1. Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara optimal;
2. Meningkatkan peran APIP sebagai *Quality Assurance, Consulting and Early Warning*;
3. Kerjasama dan tanggungjawab ASN dalam mewujudkan sasaran strategis;
4. Meningkatkan volume monitoring dan evaluasi; dan
5. Komitmen pimpinan dalam memberikan respon atau tanggapan yang baik.

Adapun gambaran hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah tahun 2020 tertuang pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD TAHUN 2022 (akhir periode Renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020			Target Program/Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2021	Perkiraan Tingkat Capaian (%)	Catatan
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)				
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)* 100	8	9	10 (9/4)* 100	11
	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									
	PROGRAM :									
4 0 1 0 0 1 1 1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sub Bag Umum
	Kegiatan :									
4 0 1 0 0 1 1 1	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan perkantoran	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Persentase jumlah surat yang dikirim	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Persentase jumlah sarana jasa, telephone, listrik, air, dan internet	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase jasa perijinan kendaraan dinas/operasional yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Persentase jumlah peralatan kerja yang siap pakai (berupa komputer, laptop dan AC)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase jumlah alat tulis kantor yang terfasilitasi (berupa kertas HVS, kertas buram, stopmap, folio, snelhechter, dll)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase jumlah barang cetakan, fotocopy dan penjilidan dokumen/laporan yang tersedia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Persentase jumlah peralatan rumah tangga berupa pembersih, tissue, pewangi ruangan, sapu, dll	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

1	2	3	4	5	6	7 (6/5)* 100	8	9	10 (9/4)* 100	11	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase jumlah buku peraturan perundang-undangan jenis surat kabar yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Penyediaan Jasa Administrasi Teknik Perkantoran	Persentase jasa administrasi teknik perkantoran yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Belanja alat listrik dan elektronika (lampu pijar, battery kering)	Persentase alat listrik dan elektronika yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
4 0 1	0 1 1 0 0 2	Penyediaan makanan dan minuman	Persentase jumlah makanan dan minuman yang tersedia untuk jamuan rapat/rapat dan tamu	100%	100%	82,30%	82,30%	100%	100%	100%	Sub Bag Umum
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dapat terfasilitas idengan lancar	100%	100%	57,62%	57,62%	100%	100%	100%		
	PROGRAM :										
4 0 1	0 1 1 0 0 2	PROGRAM: PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Kegiatan :										
4 0 1	0 1 1 0 0 2	Pemeliharaan /rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran	Persentase kendaraan dinas dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sub Bag Umum
	PROGRAM :										
4 0 1	0 1 1 0 0 3	PROGRAM: PENINGKATAN KETATALAKSANAAN DAN KAPASITAS APARATUR	Persentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Kegiatan :										

1	2	3	4	5	6	7 (6/5)* 100	8	9	10 (9/4)* 100	11
4 0 1 0 0 0 0 0	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang memiliki ikompetensi sesuai bidang tugas serta kualitas pengetahuan aparat pengawasan meningkat	100%	100%	75%	75%	100%	100%	100%	Sub Bag Umum
4 0 1 0 0 0 0 0	Penilaian angka kredit tenaga fungsional Perangkat Daerah	Terpenuhinya angka kredit JFA dan P2 UPD untuk kenaikan pangkat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sub Bag Umum
	PROGRAM :									
4 0 1 0 0 0 0 0	PROGRAM: PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Laporan Keuangan yang disusun Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Kegiatan :									
4 0 1 0 0 0 0 0	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Dokumen laporan keuangan/semesteran selesai tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sub Bag Perencanaan
	Penyusunan laporan keuangan akhir Tahun	Dokumen Laporan Keuangan Inspektorat selesai tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Penyusunan pelaporan keuangan bulanan/SPJ	Dokumen laporan keuangan bulanan yang disusun tepat waktu, jumlah petugas penatausahaan keuangan dan aset yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	PROGRAM :									
4 0 1 0 0 0 0 0	PROGRAM: PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN	Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPd dan Renstra PD terhadap RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Kegiatan :									
4 0 1 0 0 0 0 0	Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Inspektorat yang tersusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sub Bag Perencanaan

1	2	3	4	5	6	7 (6/5)* 100	8	9	10 (9/4)* 100	11	
	PenyusunanLKj IP	Persentase dokumen LKj IP yang dapat tersusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Penyusunan dan EvaluasiRenstra SKPD	Persentase dokumen Renstra dan hasil evaluas Renstra Inspektorat yang tersusun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Penyusunan dan EvaluasiRenja SKPD	Persentase dokumen Renja dan hasil levaluasi Renja Inspektorat yang tersusun	100%	100%	200%	200%	100%	100%	100%		
	Penyusunan RKA dan DPA serta DPPA	Persentase dokumen Penyusunan RKA dan DPA serta DPPA yang tersusun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	Persentase dokumen Program Kerja PengawasanTahunan (PKPT)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
4 0 1	0 0 1	0 0 5	0 0 2	Pengendalian Internal SKPD	Persentase dokumen hasil RTP dapat terimplementasi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	Sub Bag Perencanaan
	PROGRAM :										
	PROGRAM : PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Kegiatan :										
4 0 1	0 0 1	0 0 6	0 0 1	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Presentase dokumen IKM inspektorat yang tersusun dengan baik dan tepat waktu serta informasi data dapat tersaji dengan cepat dan dapat dipertanggung-jawabkan	100%	100%	100%	100%	100%	Sub Bag Umum

1	2	3	4	5	6	7 (6/5)* 100	8	9	10 (9/4)* 100	11	
	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN										
	PROGRAM :										
4 0 1	0 0 1 1 1 5	PROGRAM: PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH	Jumlah temuan audit BPK atas LKPD yang materialnya menyebabkan tidak tercapainya opini WTP Persentase PD yang sudah melakukan penilaian resiko terhadap kegiatan utama	0 100%	0 100%	0 100%	100% 100%	0 100%	0 100%		
	Kegiatan :										
4 1	0 0 1 1 5 1	0 1 5 1	Evaluasi dan ReviuLakip	Evaluasi laporan kinerja terhadap 47 SKPD serta review Laporan kinerja Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sub Bag Evaluasi&Pelaporan
4 1	0 0 1 1 5 2	0 1 5 2	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Dokumen laporan hasil pemeriksaan reguler dan hasil tindaklanjut	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sub Bag Evaluasi&Pelaporan
4 1	0 0 1 1 5 3	0 1 5 3	Reviu laporan keuangan	Persentase hasil reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah dan hasil reviu LK OPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sub Bag Evaluasi&Pelaporan
4 1	0 0 1 1 5 4	0 1 5 4	Peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah	Dokumen laporan hasil pemeriksaan khusus, dokumen kedisiplinan, opname kas desa dan stokbarang persediaan di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sub Bag Evaluasi&Pelaporan

1	2	3	4	5	6	7 (6/5)* 100	8	9	10 (9/4)* 100	11
4 0 1 0 0 1 1 5 5	Pengendalian Kebijakan Internal Pemerintah Daerah	- Persentase hasil laporan kegiatan monev LHK-ASN; Monev PMP-RB; - Hasil evaluasi ZI menuju WBK; dan laporanreviupelaksanaan RAD-PPK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sub Bag Evaluasi&Pelaporan
4 0 1 0 0 1 1 5 6	Evaluasi Hasil Pengawasan Eksternal	Persentase penyelesaian tindaklanjut temuan BPK Tahun sebelumnya sampai Tahun berkenaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sub Bag Evaluasi&Pelaporan
4 0 1 0 0 1 1 5 7	Reviu Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase hasil reviu dokumen perencanaan pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sub Bag Evaluasi&Pelaporan
4 0 1 0 0 1 1 5 8	Penyelenggaraan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)	Persentase institusi Pemerintah Bebas Pungli	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sub Bag Evaluasi&Pelaporan
4 0 1 0 0 1 1 5 9	Pendampingan maturitas SPIP Perangkat Daerah	Tingkat maturitas SPIP Kabupaten Gunungkidul level 3	3,2	2,5	3	120%	3	3	100%	Sub Bag Evaluasi&Pelaporan
4 0 1 0 0 1 1 5 0	Pemberian Jasa Konsultasi dan Asistensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa	- Persentase rekomendasi hasil asistensi/pendampingan yang tertindaklanjuti; materi yang dikonsultasikan memperoleh rekomendasi; dan persentase telaah staf yang tertindaklanjuti	100%	100%	171,53%	171,53%	100%	100%	100%	Sub Bag Evaluasi&Pelaporan

Penjelasan tabel 2.1. di atas sebagai berikut :

- Program dan Kegiatan Tahun 2020 yang tidak memenuhi target yaitu :
 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, hal ini karena pada kegiatan penyediaan makanan dan minuman realisasinya tidak maksimal karena tidak dapat memprediksi jamuan kunjungan tamu. Perjalanan Dinas Dalam Daerah terealisasi sebagian karena adanya efisiensi dalam pelaksanaannya. Perjalanan dinas luar daerah terealisasi sebagian karena perjalanan dinas kegiatan lain sudah mencukupi, terutama perjalanan dinas untuk diklat.
 - Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur, hal ini karena tidak adanya jadwal dan surat resmi permohonan pengiriman peserta diklat dari Pusdiklat BPKP.
 - Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, karena Perjalanan dinas luar daerah untuk reviu LkjIP dikirim ke Kemenpan Jakarta lewat Kantor Pos, objek pemeriksaan khusus dan kasus tidak ada yang berasal dari luar daerah, dan minimnya pemanfaatan pulsa call center Saber Pungli.
- Program dan Kegiatan Tahun 2020 yang melebihi target yaitu :
 - Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, pada kegiatan Pemberian Jasa Konsultasi dan Asistensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa terdapat penambahan target asistensi/pendampingan dari 49 dokumen menjadi 105 dokumen.

Faktor penyebab/ penghambat :

- Faktor penyebab tidak tercapainya target Tahun 2020 disebabkan karena kegiatan yang dalam pelaksanaannya melibatkan lintas SKPD, seperti pada kegiatan Pengendalian Kebijakan Internal Pemerintah Daerah dan kegiatan Penyelenggaraan Saber Pungli.
- Keterbatasan pegawai yang ada di Inspektorat termasuk dalam Jabatan Fungsional Auditor yang tidak sebanding dengan beban kerja dan tugas yang dilimpahkannya.
- Masih terdapat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pemerintah Desa yang tidak segera menindaklanjuti hasil rekomendasi terkait dengan hasil laporan pemeriksaan.

Faktor pendukung :

- Faktor pendukung yaitu adanya koordinasi sistem informasi dan sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan pengendalian program kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Termasuk pembuatan dan sosialisasi Standar Operasional Prosedur pelaksanaan kegiatan pelayanan di Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul serta kode etik Inspektorat.

Kebijakan/tindakan yang dilakukan Inspektorat dalam mengatasi faktor penghambat antara lain :

- Melakukan optimalisasi pembagian Auditor dan Penunjang Administrasi Pengawasan dengan memperhatikan beban kerja yang merata. Selain itu diupayakan untuk penambahan pegawai Jabatan Fungsional Auditor lewat jalur mutasi dari pegawai Jabatan Fungsional Umum dan atau Jabatan Struktural.
- Meningkatkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai *Quality Assurance Consulting* dan *Early Warning*.
- Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara optimal.
- Meningkatkan volume monitoring dan evaluasi melalui kegiatan - kegiatan rapat koordinasi teknis, pemanggilan obyek pemeriksaan dalam rangka percepatan penyelesaian temuan,
- Melaksanakan asistensi/pendampingan percepatan penyelesaian tindak lanjut atas saran dan perbaikan terhadap pemeriksaan BPK-RI/APIP dan pendampingan terhadap laporan keuangan terhadap seluruh Perangkat Daerah di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Dan, juga melaksanakan pendampingan- pendampingan terhadap 144 kalurahan di wilayah Kabupaten Gunungkidul terkait pertanggungjawaban APBKal dan penyusunan Rencana APBKal tahun berikutnya.
- Membuka layanan klinik konsultasi.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat

Salah satu cara untuk mengetahui tingkat capaian kinerja instansi secara keseluruhan adalah dengan melihat tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Indikator-indikator kinerja sasaran yang digunakan pada dasarnya diambil dari indikator *outcome* dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Dengan kata lain tingkat capaian kinerja instansi keseluruhan sebenarnya merupakan cermin dari keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan semua kegiatan.

Program dan kebijakan yang ada pada dasarnya merupakan suatu cara untuk mencapai sasaran dan tujuan Inspektorat Daerah. Inpektorat Daerah mengacu pada sasaran pembangunan menurut prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 yaitu "*Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik*" dengan 2 (dua) sasaran daerah yaitu Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Meningkatkan.

Realisasi capaian indikator kinerja pada tahun 2020 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
Terhadap Renstra PD tahun 2016-2021 Kabupaten Gunungkidul

NO	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Satuan (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra Inspektorat Daerah					Capaian Target Inspektorat Daerah				Proyeksi Capaian Target Renstra Inspektorat	Catatan Analisis
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Indikator Kinerja Utama (IKU)												
1.	Jumlah temuan audit BPK atas LKPD yang materialitasnya menyebabkan tidak tercapainya opini WTP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Persentase PD yang sudah melakukan penilaian risiko terhadap kegiatan utama	100%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Indikator Kinerja Kunci (IKK)												
1.	Persentase kesesuaian program dalam Renja SKPD terhadap RKPD, dan Renstra SKPD terhadap RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.	Nilai IKM Inspektorat	90	78	80	83	85	90	78	80,26	80,26	85	90	
3.	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4.	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran sarana prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5.	Persentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	90%	100%	100%	100%	
6.	Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Tabel 2.3
 Proyeksi Capaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
 Terhadap Renstra PD tahun 2021-2026
 Kabupaten Gunungkidul

NO	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Satuan (IKU, SPM, IKK	Target Renstra PD					Proyeksi CapaianTarget Renstra PD					Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Indikator Kinerja Utama (IKU)												
1.	Jumlah temuan audit BPK atas LKPD yang materialitasnya menyebabkan tidak tercapainya opini WTP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Menunjukkan jumlah temuan audit BPK atas LKPD yang materialitasnya menyebabkan tidak tercapainya opini WTP <i>Tipologi data</i> : Non Kumulatif
	Persentase PD yang sudah melakukan penilaian risiko terhadap kegiatan utama	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah PD yang melakukan penilaian risiko terhadap kegiatan utama dibagi jumlah PD x100%
	Indikator Kinerja Kunci (IKK)												
1.	Persentase kesesuaian program dalam Renja SKPD terhadap RKPD, dan Renstra SKPD terhadap RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah program dalam Renja dibagi jumlah program dalam RKPD dan jumlah program dalam Renstra dibagi jumlah program dalam RPJMD
2.	Nilai IKM Inspektorat	79,45	79,32	79,35	79,39	79,42	79,45	79,32	79,35	79,39	79,42	79,45	Jumlah nilai persepsi per unsur dibagi jumlah unsur yang terisi dikali nilai penimbang
3.	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah realisasi pemenuhan administrasi perkantoran dibagi jumlah administrasi perkantoran yang dibutuhkan x 100%
4.	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran sarana prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah realisasi pemenuhan sarana dan prasarana dibagi jumlah sarana dan prasarana yang direncanakan x 100%
5.	Persentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang dibagi jumlah PNS x 100%
6.	Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah laporan keuangan disusun tepat waktu dibagi jumlah laporan keuangan disusun x 100%

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga pengawas internal, Inspektorat Daerah menghadapi beberapa permasalahan dalam rangka mewujudkan visi dan misi RPJPD yang telah dirumuskan, sebagaimana tersebut di bawah ini:

Kondisi :

- a. masih kurangnya produktivitas dan efisiensi dalam pengelolaan urusan pemerintahan;
- b. belum efektifnya pengawasan melekat;
- c. kecenderungan pelanggaran disiplin aparatur daerah dari tahun ke tahun meningkat; dan
- d. masih kurangnya pengertian masyarakat dalam masalah hukum.

Permasalahan :

- a. kecenderungan dalam pelaksanaan pemerintahan yang bersifat boros dan bersifat rutinitas, belum menerapkan manajemen risiko dalam melaksanakan tugasnya;
- b. kualitas sumber daya manusia pemerintah belum merata sehingga terjadi penumpukan pekerjaan pada satu personil;
- c. sistem pembinaan PNS belum memadai dan kinerja PNS belum maksimal;
- d. kompetensi pegawai belum sesuai dengan formasi jabatan; dan
- e. rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

2. Dampak terhadap Pencapaian

Sesuai visi dan misi yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2005-2025, Inspektorat Daerah berfokus pada misi untuk peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bebas KKN. Hal tersebut sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban Inspektorat Daerah sebagai pembantu Bupati di Bidang Pengawasan. Jika dilihat dari berbagai permasalahan yang dikemukakan di atas, maka dalam pelaksanaan/pencapaian misi tersebut terdapat beberapa permasalahan yang menjadi penghambat.

Beberapa permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. belum semua aparatur pengawasan memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. perlu adanya perubahan paradigma pengawasan dengan mengedepankan pembinaan dan perbaikan kerja;
- c. sarana dan prasarana pendukung pemeriksa yang belum memadai dan mencukupi; dan
- d. belum berfungsinya Sistem Pengendalian Intern (SPI) di setiap OPD yang menyebabkan terjadinya penyimpangan.

3. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan PD

Analisis strategis dalam rangka menentukan tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dibagi dua yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Pengenalan terhadap kekuatan dan kelemahan (faktor intern) lebih mudah dibanding mengidentifikasi faktor ekstern terutama merumuskan ancaman.

Lingkungan internal terdiri dari kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan (*Weaknesses*). Kekuatan yaitu faktor-faktor yang ada dalam organisasi yang bersifat membanggakan dan menjadi potensi untuk dikembangkan dalam organisasi, sedangkan kelemahan adalah segala sesuatu yang menjadi masalah di dalam organisasi.

Kekuatan

Pada dasarnya, Inspektorat Daerah mempunyai banyak hal yang apabila didayagunakan secara maksimal akan menjadi faktor pendukung pencapaian tujuan organisasi yaitu :

- a. Kode Etik dan Standar Kerja yang jelas
Beberapa standar kerja Inspektorat antara lain Standar Audit Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kabupaten Gunungkidul. Standar Kerja disusun untuk menjaga agar kualitas hasil pengawasan tidak mengalami penurunan.
- b. Pembagian kerja yang jelas
Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah.
- e. Piagam Audit (*Audit Charter*).
- f. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Gunungkidul dan Surat Tugas sebagai aplikasi program kerja Inspektorat Daerah yang merupakan rangkaian ketentuan mengenai pembagian kerja.

Kelemahan

Hal-hal yang menjadi masalah bagi Inspektorat Daerah yaitu :

- a. Tidak berwenang menjatuhkan sanksi terhadap obyek pemeriksaan yang tidak melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
Kewenangan yang tidak dimiliki adalah menjatuhkan sanksi secara langsung terhadap obyek pemeriksaan yang tidak melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Dalam keadaan tertentu Inspektorat Daerah dapat bekerjasama dengan institusi lain seperti Sekretaris Daerah, atau menaikkan kepada Bupati/Wakil Bupati untuk mengoptimalkan tindak lanjut guna perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang lebih baik.
- b. Prasarana dan sarana kerja yang belum memadai.
Selain belum mencukupinya sumber daya manusia, kondisi prasarana dan

saranakerja juga tidak sebanding dengan beban kerja, dan secara umum belum mampu mendukung pelaksanaan tugas secara optimal, seperti kendaraan operasional untuk mendukung sistem kerja secara tim, ruang kerja, ruang dokumen/arsip yang masih terbatas, dan alat penguji/pendukung pemeriksaan.

Peluang (*Opportunities*)

Faktor-faktor di luar Inspektorat Daerah yang memberikan kemungkinan organisasi bisa eksis, tumbuh, dan berkembang, serta menjadi potensi bagi organisasi agar mampu bersaing dengan pihak luar yaitu :

1. Organisasi Pemerintah Daerah mutlak memerlukan Sistem Pengawasan Internal.

Semua teori manajemen menyebutkan pengawasan atau pengendalian (*controlling*) sebagai salah satu fungsi manajemen. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mutlak memerlukan Inspektorat Daerah untuk menjamin dilaksanakannya kebijakan demi tertibnya organisasi sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku.

Inspektorat Daerah dibentuk untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang akuntabel.

2. Masyarakat menghendaki penegakan hukum.

Berdasarkan pengalaman masa lalu, masyarakat menginginkan suatu pemerintahan yang lebih baik. Isu KKN ditanggapi oleh Pemerintah dengan mengeluarkan seperangkat kebijakan pemberantasan KKN. Beberapa kebijakan yang dapat dikemukakan antara lain :

- a. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara; dan
- e. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

3. Jumlah obyek dan sasaran pemeriksaan.

Jumlah obyek dan sasaran pemeriksaan adalah lembaga/OPD dan desa dalam wilayah kewenangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, baik UPT Puskesmas dari Dinas Kesehatan maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri sebagai UPT dari Disdikpora dengan demikian semua potensi yang ada dapat dilaksanakan secara optimal. Pada tahun 2020 Inspektorat telah berusaha melaksanakan pendampingan terhadap 5 (aspek) pemeriksaan

seperti Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, Penatausahaan Keuangan Aset, Persediaan, Pengelolaan Piutang Daerah, Hibah dan Bantuan Sosial, selain itu juga melakukan asistensi dengan sasaran penyusunan pertanggungjawaban APBKal serta penyusunan Rencana APBKal terhadap 144 kalurahan.

Ancaman (Threats)

Faktor-faktor di luar Inspektorat Daerah yang membahayakan atau mengancam eksistensi organisasi yaitu :

1. Komitmen manajemen terhadap pengawasan lemah. Inspektorat Daerah sangat dipengaruhi oleh komitmen manajemen (*Decision Maker*).
2. Kurangnya kepedulian obyek pemeriksaan terhadap tindaklanjut hasil pemeriksaan.

Kepedulian obyek pemeriksaan dalam tindaklanjut hasil pemeriksaan diukur dari kecepatan penyelesaian pelaksanaan rekomendasi hasil pemeriksaan.

Semakin lambat tindaklanjut diselesaikan, semakin rendah tingkat kepedulian obrik terhadap eksistensi Inspektorat Daerah dan perbaikan kinerja instansi itu sendiri.

Isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2022 adalah :

1. Ketersediaan data dan kelengkapan pemeriksaan sangat diperlukan untuk mencapai target Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul pada Level 3.
2. Penambahan PNS Jabatan Fungsional Auditor untuk memenuhi kekurangan personel pemeriksa, penambahan peserta Diklat dan SDM penunjang.

2.4 REVIEW TERHADAP RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah dilakukan dengan membandingkan antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan hasil analisis kebutuhan. Hal tersebut dilakukan agar rencana kerja yang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kondisi yang riil serta menghindari adanya program/kegiatan yang tidak diperlukan. Berdasarkan hasil reuiu, semua program kegiatan yang direncanakan telah sesuai dengan program dan kegiatan yang ada di RKPD namun terdapat penyesuaian anggaran pada beberapa kegiatan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan. Hal ini berimbas ke arah penyederhanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dibutuhkan.

Penjabaran program kegiatan berdasarkan reuiu terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022 tertuang pada Tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.4
 Reviu terhadap rancangan awal RKPD tahun 2022
 Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten terlaksana dengan baik	100%	8.198.879.936	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten terlaksana dengan baik	100%	8.198.879.936	
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul</i>	<i>Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu</i>	100%	55.635.450	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul</i>	<i>Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu</i>	100%	55.635.450	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Profil PD Jumlah dokumen Renja dan Renja Perubahan Pelaksanaan Forum PD	1 dokumen 2 dokumen 1 kali	50.825.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Profil PD Jumlah dokumen Renja dan Renja Perubahan Pelaksanaan Forum PD	1 dokumen 2 dokumen 1 kali	50.825.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA	1 dokumen	465.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA	1 dokumen	465.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA Perubahan	1 dokumen	465.450	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA Perubahan	1 dokumen	465.450	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPA Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja Jumlah dokumen ROPK	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	1.410.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPA Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja Jumlah dokumen ROPK	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	1.410.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPPA Jumlah dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja	1 dokumen 1 dokumen	865.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPPA Jumlah dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja	1 dokumen 1 dokumen	865.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen LKJIP Jumlah Laporan e-Monev Jumlah Laporan TEPRA	1 dokumen 4 dokumen 12 dokumen	1.605.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen LKJIP Jumlah Laporan e-Monev Jumlah Laporan TEPRA	1 dokumen 4 dokumen 12 dokumen	1.605.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul	Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu	100%	6.633.630.071	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul	Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu	100%	6.633.630.071	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah bulan terfasilitasi gaji dan tunjangan ASN (50 x 14 bulan)	26 bulan	6.626.940.071	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah bulan terfasilitasi gaji dan tunjangan ASN (50 x 14 bulan)	26 bulan	6.626.940.071	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	650.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	650.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD		Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/SPJ Jumlah dokumen Laporan Keuangan Semesteran	12 dokumen 1 dokumen	6.040.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD		Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/SPJ Jumlah dokumen Laporan Keuangan Semesteran	12 dokumen 1 dokumen	6.040.000	
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul</i>	<i>Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian</i>	100%	174.635.000	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul</i>	<i>Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian</i>	100%	174.635.000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah ASN tertangani/terfasilitasi Jumlah JFA dan P2UPD yang mendapat penilaian angka kredit	49 ASN 30 Orang	5.350.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah ASN tertangani/terfasilitasi Jumlah JFA dan P2UPD yang mendapat penilaian angka kredit	49 ASN 30 Orang	5.350.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah aparat pengawasan mendapatkan pelatihan di kantor sendiri/PKS (40 orang x 4) Jumlah ASN yang mengikuti diklat dan Bimtek Peningkatan kualitas aparat pengawasan	160 orang 27 orang	169.285.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah aparat pengawasan mendapatkan pelatihan di kantor sendiri/PKS (40 orang x 4) Jumlah ASN yang mengikuti diklat dan Bimtek Peningkatan kualitas aparat pengawasan	160 orang 27 orang	169.285.000	
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul</i>	<i>Persentase layanan administrasi umum terlayani</i>	100%	525.529.415	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul</i>	<i>Persentase layanan administrasi umum terlayani</i>	100%	525.529.415	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah peralatan listrik dan elektronika kantor tersedia (lampu, kabel, fitting dll)	3 jenis	10.700.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah peralatan listrik dan elektronika kantor tersedia (lampu, kabel, fitting dll)	3 jenis	10.700.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah alat tulis kantor yang tersedia (kertas A4, F4, bolpen, pensil, cutter, toner, clip dll) Jumlah belanja modal Alat Ukur/ Sketmat sigmat Jumlah belanja modal Camera Jumlah belanja modal Handycam Jumlah belanja modal Hardis External Jumlah belanja modal Komputer PC All in One Jumlah belanja modal laptop Core 15 Jumlah belanja modal Mesin Hitung/hand counter Jumlah belanja modal Penghancur Kertas Jumlah belanja modal Scanner ADF Jumlah belanja modal Steam Alat Cuci Mobil	10 jenis 7 unit 1 unit 1 unit 7 unit 1 unit 13 unit 7 unit 2 unit 2 unit 1 unit	351.285.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah alat tulis kantor yang tersedia (kertas A4, F4, bolpen, pensil, cutter, toner, clip dll) Jumlah belanja modal Alat Ukur/ Sketmat sigmat Jumlah belanja modal Camera Jumlah belanja modal Handycam Jumlah belanja modal Hardis External Jumlah belanja modal Komputer PC All in One Jumlah belanja modal laptop Core 15 Jumlah belanja modal Mesin Hitung/hand counter Jumlah belanja modal Penghancur Kertas Jumlah belanja modal Scanner ADF Jumlah belanja modal Steam Alat Cuci Mobil	10 jenis 7 unit 1 unit 1 unit 7 unit 1 unit 13 unit 7 unit 2 unit 2 unit 1 unit	351.285.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah bahan dan peralatan kebersihan tersedia	10 jenis	11.685.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah bahan dan peralatan kebersihan tersedia	10 jenis	11.685.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah barang cetakan Jumlah penggandaan yang tersedia	5 jenis 6000 lembar	16.050.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah barang cetakan Jumlah penggandaan yang tersedia	5 jenis 6000 lembar	16.050.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah surat kabar/majalah yang tersedia (1 eksemplar x 12 bulan)	12 bulan	1.284.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah surat kabar/majalah yang tersedia (1 eksemplar x 12 bulan)	12 bulan	1.284.000	
	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah minuman dan snack tamu	150 orang	5.250.000	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah minuman dan snack tamu	150 orang	5.250.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Frekuensi koordinasi, konsultasi, pengembangan profesi, dan terselenggaranya forum bersama antar aparat pengawas, perjalanan dinas dalam daerah Frekuensi koordinasi, konsultasi, pengembangan profesi, dan terselenggaranya forum bersama antar aparat pengawas, perjalanan dinas luar daerah Jumlah minuman dan snack tersedia untuk rapat-rapat	60 orang 25 orang 150 orang	129.275.415	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Frekuensi koordinasi, konsultasi, pengembangan profesi, dan terselenggaranya forum bersama antar aparat pengawas, perjalanan dinas dalam daerah Frekuensi koordinasi, konsultasi, pengembangan profesi, dan terselenggaranya forum bersama antar aparat pengawas, perjalanan dinas luar daerah Jumlah minuman dan snack tersedia untuk rapat-rapat	60 orang 25 orang 150 orang	129.275.415	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana	100%	150.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana	100%	150.000.000	
	Pengadaan Mebel		Jumlah belanja mebeleir kantor (meja kursi pegawai)	40 unit	80.000.000	Pengadaan Mebel		Jumlah belanja mebeleir kantor (meja kursi pegawai)	40 unit	80.000.000	
	Pengadaan Aset Tak Berwujud		Jumlah pengadaan SIM HP	1 unit	20.000.000	Pengadaan Aset Tak Berwujud		Jumlah pengadaan SIM HP	1 unit	20.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah pengadaan korden Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor interior ruang (bantuan disabilitas)	50 meter 1 unit	50.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah pengadaan korden Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor interior ruang (bantuan disabilitas)	50 meter 1 unit	50.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	100%	263.875.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	100%	263.875.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah jasa surat menyurat tersedia Jumlah surat yang dikirim	12 bulan 600 surat	44.550.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah jasa surat menyurat tersedia Jumlah surat yang dikirim	12 bulan 600 surat	44.550.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Sarana jasa air yang tersedia (1 Rekening x 12) Jumlah Sarana jasa listrik yang tersedia (1 Rekening x 12) Jumlah Sarana jasa telepon yang tersedia (1 Rekening x 12)	12 rekening 12 rekening 12 rekening	160.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Sarana jasa air yang tersedia (1 Rekening x 12) Jumlah Sarana jasa listrik yang tersedia (1 Rekening x 12) Jumlah Sarana jasa telepon yang tersedia (1 Rekening x 12)	12 rekening 12 rekening 12 rekening	160.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		jumlah jasa kebersihan kantor dibayar	12 bulan	59.325.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		jumlah jasa kebersihan kantor dibayar	12 bulan	59.325.000	

	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul</i>	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	393.425.000	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul</i>	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	393.425.000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas roda 2 terpelihara Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang terbayar pajaknya Jumlah kendaraan dinas roda 4 terpelihara Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang terbayar pajaknya	8 unit 8 unit 7 unit 7 unit	234.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas roda 2 terpelihara Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang terbayar pajaknya Jumlah kendaraan dinas roda 4 terpelihara Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang terbayar pajaknya	8 unit 8 unit 7 unit 7 unit	234.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah komputer yang terfasilitasi pemeliharaannya Jumlah laptop yang terfasilitasi pemeliharaannya Jumlah printer yang terfasilitasi pemeliharaannya	2 unit 45 unit 2 unit	13.375.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah komputer yang terfasilitasi pemeliharaannya Jumlah laptop yang terfasilitasi pemeliharaannya Jumlah printer yang terfasilitasi pemeliharaannya	2 unit 45 unit 2 unit	13.375.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah rehab pagar dan taman kantor	450 meter	130.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah rehab pagar dan taman kantor	450 meter	130.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah AC yang terfasilitasi pemeliharaannya	15 unit	16.050.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah AC yang terfasilitasi pemeliharaannya	15 unit	16.050.000	
	<i>Penataan Organisasi</i>	<i>Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul</i>	<i>IKM PD</i>	79,32 indeks	2.150.000	<i>Penataan Organisasi</i>	<i>Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul</i>	<i>IKM PD</i>	79,32 indeks	2.150.000	
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah dokumen RTP SPIP Jumlah dokumen SOP Jumlah dokumen Survei Kepuasan Masyarakat (KM)	2 dokumen 1 dokumen 2 dokumen	2.150.000	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah dokumen RTP SPIP Jumlah dokumen SOP Jumlah dokumen Survei Kepuasan Masyarakat (IKM)	2 dokumen 1 dokumen 2 dokumen	2.150.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	100%	1.491.500.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	100%	1.491.500.000	
	<i>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</i>	<i>Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul</i>	<i>Persentase hasil pengawasan internal ditindaklanjuti</i>	100%	625.500.000	<i>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</i>	<i>Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul</i>	<i>Persentase hasil pengawasan internal ditindaklanjuti</i>	100%	625.500.000	
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah dan OPD yang direviu (KUA PAS murni dan perubahan, RKA murni dan perubahan dan Review BTT)	96 dokumen	150.000.000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah dan OPD yang direviu (KUA PAS murni dan perubahan, RKA murni dan perubahan dan Review BTT)	96 dokumen	150.000.000	
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah objek pemeriksaan reguler dan pemeriksaan kinerja Jumlah obyek Evaluasi tindak lanjut	84 auditan 4 dokumen	150.000.000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah objek pemeriksaan reguler dan pemeriksaan kinerja Jumlah obyek Evaluasi tindak lanjut	84 auditan 4 dokumen	150.000.000	
	Reviu Laporan Kinerja		Jumlah Dokumen hasil reviu laporan keuangan Pemda Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah dan OPD yang direviu (RKPD murni dan perubahan; Renja murni dan perubahan)	1 dokumen 4 dokumen	140.000.000	Reviu Laporan Kinerja		Jumlah Dokumen hasil reviu laporan keuangan Pemda Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah dan OPD yang direviu (RKPD murni dan perubahan; Renja murni dan perubahan)	1 dokumen 4 dokumen	140.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Reviu Laporan Keuangan		Jumlah Dokumen review DAK dan review lainnya sesuai amanat pemerintah Kabupaten, Propinsi, dan Pusat	30 dokumen	185.500.000	Reviu Laporan Keuangan		Jumlah Dokumen review DAK dan review lainnya sesuai amanat pemerintah Kabupaten, Propinsi, dan Pusat	30 dokumen	185.500.000	
	<i>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</i>	<i>Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul</i>	<i>Persentase hasil pengawasan dengan tujuan tertentu ditindaklanjuti</i>	100%	866.000.000	<i>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</i>	<i>Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul</i>	<i>Persentase hasil pengawasan dengan tujuan tertentu ditindaklanjuti</i>	100%	866.000.000	
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		Jumlah dokumen hasil Laporan pemeriksaan khusus Jumlah Dokumen Laporan Saber Pungli Jumlah dokumen tindak lanjut LHP BPK-RI sesuai rekomendasi	50 dokumen 1 dokumen 2 dokumen	866.000.000	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		Jumlah dokumen hasil Laporan pemeriksaan khusus Jumlah Dokumen Laporan Saber Pungli Jumlah dokumen tindak lanjut LHP BPK-RI sesuai rekomendasi	50 dokumen 1 dokumen 2 dokumen	866.000.000	
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Persentase PD yang sudah melakukan manajemen risiko	100%	413.100.000	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Persentase PD yang sudah melakukan manajemen risiko	100%	413.100.000	
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</i>	<i>Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul</i>	<i>Persentase Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan terlaksana</i>	100%	5.350.000	<i>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</i>	<i>Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul</i>	<i>Persentase Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan terlaksana</i>	100%	5.350.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		Jumlah Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), Peta Pengawasan, Kendali Mutu Audit (KMA)	3 dokumen	2.675.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		Jumlah Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), Peta Pengawasan, Kendali Mutu Audit (KMA)	3 dokumen	2.675.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan		Jumlah dokumen kebijakan teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Jumlah Dokumen telaahan staf	2 dokumen 4 dokumen	2.675.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan		Jumlah dokumen kebijakan teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Jumlah Dokumen telaahan staf	2 dokumen 4 dokumen	2.675.000	
	<i>Pendampingan dan Asistensi</i>	<i>Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul</i>	<i>Persentase pendampingan dan asistensi terlaksana</i>	100%	407.750.000	<i>Pendampingan dan Asistensi</i>	<i>Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul</i>	<i>Persentase pendampingan dan asistensi terlaksana</i>	100%	407.750.000	
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Dokumen hasil asistensi/ pendampingan	96 dokumen	400.000.000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Dokumen hasil asistensi/ pendampingan	96 dokumen	400.000.000	
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		Jumlah Dokumen evaluasi Whistle Blower System Jumlah Dokumen hasil evaluasi benturan kepentingan Jumlah Dokumen hasil evaluasi Zona Integritas (ZI), Wilayah Bebas Korupsi (WBK), Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Jumlah Dokumen laporan movev Korsupgah KPK Jumlah Dokumen movev gratifikasi Jumlah Dokumen movev PMPRB Jumlah hasil evaluasi maturitas SPIP	2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 7 dokumen	7.750.000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		Jumlah Dokumen evaluasi Whistle Blower System Jumlah Dokumen hasil evaluasi benturan kepentingan Jumlah Dokumen hasil evaluasi Zona Integritas (ZI), Wilayah Bebas Korupsi (WBK), Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Jumlah Dokumen laporan movev Korsupgah KPK Jumlah Dokumen movev gratifikasi Jumlah Dokumen movev PMPRB Jumlah hasil evaluasi maturitas SPIP	2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 7 dokumen	7.750.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam mencari usulan Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul melaksanakan forum PD yang melibatkan *stakeholder* guna percepatan pembangunan yang lebih baik pada tahun 2022, namun dalam hal ini Inspektorat Daerah tidak ada usulan program atau kegiatan yang langsung dari masyarakat, karena sesuai dengan isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat adalah sebagai lembaga pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintahan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Pada dasarnya Inspektorat Daerah bernaung di bawah Kementerian Dalam Negeri seperti halnya Perangkat Daerah (PD) yang lain di Pemerintah Daerah, akan tetapi dalam operasional pengawasan Inspektorat Daerah lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal tersebut disebabkan karena BPKP merupakan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor (JFA). Kondisi ini memunculkan beberapa permasalahan karena adanya perbedaan standar pengawasan yang diterapkan BPKP dengan standar dari Kementerian Dalam Negeri. Dengan kondisi seperti ini, Inspektorat Daerah mengutamakan standar dari BPKP di samping standar yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan menyesuaikan kebutuhan. Keuntungan yang diperoleh yaitu kualitas sumber daya pengawasan hasil diklat BPKP mempunyai kualifikasi dan kompetensi yang setara secara nasional.

Peran Inspektorat sebagai institusi pengawasan sangat diperlukan untuk mendorong setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul agar mentaati hukum yang berlaku dalam melaksanakan program dan kegiatannya, yang akan bermuara pada penegakan hukum di Kabupaten Gunungkidul. Sesuai dengan perubahan paradigma pengawasan dari hanya sekedar *watch dog* menjadi *quality assurance*, Inspektorat Daerah mau tidak mau harus merubah paradigma pengawasannya dengan mengedepankan pembinaan daripada memberikan vonis salah atau benar kepada obyek pemeriksaannya. Inspektorat Daerah juga harus bisa memberikan solusi dari permasalahan yang ditemukan pada saat pemeriksaan, yaitu bersama-sama dengan obyek pemeriksaannya berusaha menemukan permasalahan yang ada serta mencari solusi yang terbaik bagi keberlanjutan organisasi dalam mencapai tujuan. Tujuan utama dari kondisi-kondisi yang diharapkan tersebut adalah aparat birokrasi yang bersih, profesional dan berdampak pada pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menjadi lebih berkualitas.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat

Adapun tujuan yang dijadikan pedoman Inspektorat Daerah adalah “Pengendalian Internal terhadap Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah meningkat”.

Perumusan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja dalam dokumen Rancangan Renstra. Dalam menyusun tujuan dan sasaran pada Rencana Kerja Tahun 2022, Inspektorat berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2022 serta mengacu pada tema dan prioritas pembangunan dan visi misi Kepala Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Adapun tema pembangunan Tahun 2022 sesuai dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 “Percepatan pemulihan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat tahun 2022” dengan prioritas Pembangunan yang dijadikan acuan untuk Inspektorat Daerah adalah “Reformasi Birokrasi”.

Dalam bagian ini disajikan tabel penjabaran sasaran daerah ke dalam sasaran Inspektorat seperti tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran Inspektorat Daerah

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah (Outcome)	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
1.	Reformasi Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Nilai AKIP	1. Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah meningkat 2. Akuntabilitas kinerja PD meningkat	1. Nilai Maturitas SPIP 2. Nilai AKIP PD

Selanjutnya hubungan antara tujuan dengan sasaran Inspektorat Daerah dituangkan dalam tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Tujuan Inspektorat Daerah

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan PD Tahun 2022
1.	Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah yang handal	Nilai Maturitas SPIP	3,85

Tabel 3.3
Sasaran Inspektorat Daerah

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Sasaran PD Tahun 2022
1.	Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah meningkat	Nilai Maturitas SPIP	3,85
2.	Akuntabilitas kinerja PD meningkat	Nilai AKIP PD	BB

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja IKU PD	Target Kinerja IKU
1.	Nilai Maturitas SPIP tahun 2026	Nilai Maturitas SPIP	3,85

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH

Inspektorat Daerah dengan mempertimbangkan tugas dan fungsinya untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, maka Inspektorat Daerah mendukung Misi pertama Bupati yaitu “*Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dan Dinamis*” serta Sasaran Daerah “*Kapasitas Tata Kelola Pemerintah meningkat*” dengan Prioritas Daerah yang keduanya itu Reformasi Birokrasi.

Sasaran tersebut dialirkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan pada tahun 2022, yang terdiri dari 3 Program dijabarkan dalam 12 kegiatan dan 38 sub kegiatan seperti tertuang pada table 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Inspektorat Daerah tahun 2022

No	Sasaran	Nama Program/Kegiatan
1.	Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah meningkat	Program : Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan : 1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal 2. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
		Program : Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi Kegiatan : 1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
2.	Akuntabilitas kinerja PD meningkat	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 8. Penataan Organisasi

Manajemen pembangunan berbasis kinerja berfokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Rencana kerja ini mencerminkan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan seperti halnya pencapaian visi dan misi kepala daerah, prioritas pembangunan, dan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah.

Pagu anggaran yang direncanakan untuk melaksanakan program dan kegiatan Inspektorat untuk Tahun 2022 sejumlah Rp10.103.479.936,00 (sepuluh milyar seratus tiga juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) program dan 12 (duabelas) kegiatan, yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunungkidul.

Berdasarkan 7 (tujuh) prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, Inspektorat Daerah mengacu pada prioritas yang kedua yaitu "*Reformasi Birokrasi*", seperti yang tertuang dalam tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2
 Prioritas, Sasaran, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan
 Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul
 Tahun 2022

Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Murni	Pagu Maju	PD					
				Indikator	Target											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Reformasi Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Nilai AKIP	Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah meningkat	Nilai Maturitas SPIP		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	150.000.000	150.000.000	Inspektorat Daerah					
								Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	150.000.000	150.000.000	Inspektorat Daerah					
								Reviu Laporan Kinerja	140.000.000	140.000.000	Inspektorat Daerah					
								Reviu Laporan Keuangan	185.500.000	185.500.000	Inspektorat Daerah					
												Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	150.000.000	150.000.000	Inspektorat Daerah
											PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	2.675.000	2.850.000	Inspektorat Daerah
													Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	2.675.000	2.860.000	Inspektorat Daerah
													Pendampingan	Pendampingan dan Asistensi	400.000.000	400.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							dan Asistensi	Urusan Pemerintahan Daerah			Daerah
								Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	7.750.000	8.300.000	Inspektorat Daerah
			Akuntabilitas kinerja PD meningkat	Nilai AKIP PD		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.825.000	54.382.750	Inspektorat Daerah
								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	465.000	495.000	Inspektorat Daerah
								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	465.450	498.000	Inspektorat Daerah
								Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.410.000	1.510.000	Inspektorat Daerah
								Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	865.000	925.000	Inspektorat Daerah
								Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.605.000	1.720.000	Inspektorat Daerah
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.626.940.071	7.090.825.876	Inspektorat Daerah
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	650.000	695.000	Inspektorat Daerah
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.040.000	6.462.800	Inspektorat Daerah
							Administrasi	Pendataan dan Pengolahan	5.350.000	5.724.500	Inspektorat

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Kepegawaian	Administrasi Kepegawaian			Daerah
							Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	169.285.000	106.500.000	Inspektorat Daerah
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.700.000	11.449.000	Inspektorat Daerah
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	351.285.000	374.966.260	Inspektorat Daerah
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.685.000	25.675.000	Inspektorat Daerah
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.050.000	17.170.000	Inspektorat Daerah
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.284.000	1.370.000	Inspektorat Daerah
								Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.250.000	5.250.000	Inspektorat Daerah
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	129.275.415	133.587.157	Inspektorat Daerah
							Pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Mebel	80.000.000	50.000.000	Inspektorat Daerah
							Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Aset Tak Berwujud	20.000.000	0	Inspektorat Daerah
								Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	50.000.000	Inspektorat Daerah
							Penyediaan Jasa	Penyediaan Jasa Surat	44.550.000	50.000.000	Inspektorat

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Menyurat			Daerah
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	160.000.000	160.000.000	Inspektorat Daerah
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	59.325.000	59.325.000	Inspektorat Daerah
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	234.000.000	250.000.000	Inspektorat Daerah
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.375.000	14.311.250	Inspektorat Daerah
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	130.000.000	130.000.000	Inspektorat Daerah
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.050.000	17.173.500	Inspektorat Daerah
							Penataan Organisasi	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2.150.000	2.300.000	Inspektorat Daerah

Tabel 4.3
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi
Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2022

No	Program/ Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Maju (Rp) 2023	SKPD
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.198.879.936	8.622.316.093	IRDA
	Kegiatan :			
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.635.450	59.530.750	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.633.630.071	7.097.983.676	
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	174.635.000	112.224.500	
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	525.529.415	569.467.417	
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	150.000.000	100.000.000	
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	263.875.000	269.325.000	
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	393.425.000	411.484.750	
1.8	Penataan Organisasi	2.150.000	2.300.000	
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.491.500.000	1.491.500.000	IRDA
	Kegiatan :			
2.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	625.500.000	625.500.000	
2.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	866.000.000	866.000.000	
3.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	413.100.000	414.010.000	IRDA
	Kegiatan :			
3.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	5.350.000	5.710.000	
3.2	Pendampingan dan Asistensi	407.750.000	408.300.000	
TOTAL JUMLAH		10.103.479.936	10.527.826.093	

Tabel 4.4
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN								
6	01				INSPEKTORAT			10.103.479.936				10.527.826.093	
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota terlaksana dengan baik		100 Persen	8.198.879.936		100 Persen	8.622.316.093	
6	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu		100 Persen	55.635.450		100 Persen	59.530.750	
6	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Profil PD Jumlah dokumen Renja dan Renja Perubahan Pelaksanaan Forum PD	Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen 2 dokumen 1 kali	50.825.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1 dokumen 2 dokumen 1 kali	54.382.750	
6	01	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan,	1 dokumen	465.000	Dana Transfer Umum- Dana	1 dokumen	495.000	

(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
							Semua Kelurahan			Alokasi Umum			
6	01	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	465.450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	498.000
6	01	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja Jumlah dokumen ROPK	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	1.410.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	1.510.000
6	01	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPPA Jumlah dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen 1 dokumen	865.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen 1 dokumen	925.000
6	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKjIP Jumlah Laporan e-Monev Jumlah Laporan TEPR	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen 4 dokumen 12 dokumen	1.605.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen 4 dokumen 12 dokumen	1.720.000
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu		100 Persen	6.633.630.071			100 Persen	7.097.983.676

(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terfasilitasi gaji dan tunjangan ASN (50 x 14 bulan)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26 bulan	6.626.940.071	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		26 bulan	7.090.825.876
6	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	695.000
6	01	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/SPJ Jumlah dokumen Laporan Keuangan Semesteran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 dokumen 1 dokumen	6.040.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 dokumen 1 dokumen	6.462.800
6	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian		100 Persen	174.635.000			100 Persen	112.224.500
6	01	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN tertangani/terfasilitasi Jumlah JFA dan P2UPD yang mendapat penilaian angka kredit	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49 ASN 30 Orang	5.350.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		49 ASN 30 Orang	5.724.500

(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparat pengawasan mendapatkan pelatihan di kantor sendiri/PKS (40 orang x 4) Jumlah ASN yang mengikuti diklat dan Bimtek Peningkatan kualitas aparat pengawasan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	160 orang 27 orang	169.285.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		160 orang 27 orang	106.500.000
6	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum terlayani		100 Persen				100 Persen	569.467.417
6	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan listrik dan elektronika kantor tersedia (lampu, kabel, fitting dll)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 jenis	10.700.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		3 jenis	11.449.000
6	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia (kertas A4. F4, bolpen, pensil, cutter, toner, clip dll) Jumlah belanja modal Alat Ukur/ Sketmat sigmat Jumlah belanja modal Camera Jumlah belanja modal Handycam Jumlah belanja modal Hardis External Jumlah belanja modal Komputer PC All in One	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 jenis 7 unit 1 unit 1 unit 7 unit 1 unit 13 unit 7 unit 2 unit 2 unit 1 unit	351.285.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 jenis 7 unit 1 unit 1 unit 7 unit 1 unit 13 unit 7 unit 2 unit 2 unit 1 unit	374.966.260

(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Jumlah belanja modal laptop Core 15 Jumlah belanja modal Mesin Hitung/hand counter Jumlah belanja modal Penghancur Kertas Jumlah belanja modal Scanner ADF Jumlah belanja modal Steam Alat Cuci Mobil							
6	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan tersedia	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 jenis	11.685.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 jenis	25.675.000
6	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan Jumlah penggandaan yang tersedia	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 jenis 6000 lembar	16.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 jenis 6000 lembar	17.170.000
6	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar/majalah yang tersedia (1 eksemplar x 12 bulan)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan,	12 bulan	1.284.000	Dana Transfer Umum-Dana		12 bulan	1.370.000

(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
							Semua Kelurahan			Alokasi Umum			
6	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah minuman dan snack tamu	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150 orang	5.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		150 orang	5.250.000
6	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi koordinasi, konsultasi, pengembangan profesi, dan terselenggaranya forum bersama antar aparat pengawas, perjalanan dinas dalam daerah Frekuensi koordinasi, konsultasi, pengembangan profesi, dan terselenggaranya forum bersama antar aparat pengawas, perjalanan dinas luar daerah Jumlah minuman dan snack tersedia untuk rapat-rapat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 orang 25 orang 150 orang	129.275.415	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		60 orang 25 orang 150 orang	133.587.157
6	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana		100 Persen	150.000.000			100 Persen	100.000.000

(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah belanja mebeleir kantor (meja kursi pegawai)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 unit	80.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		40 unit	50.000.000
6	01	01	2,07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah pengadaan SIM HP	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 unit	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 unit	0
6	01	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan korden Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor interior ruang (bantuan disabilitas)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 meter 1 unit	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 meter 1 unit	50.000.000
6	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana		100 Persen	263.875.000			100 Persen	269.325.000
6	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat tersedia Jumlah surat yang dikirim	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 bulan 600 surat	44.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan 600 surat	50.000.000

(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Sarana jasa air yang tersedia (1 Rekening x 12) Jumlah Sarana jasa listrik yang tersedia (1 Rekening x 12) Jumlah Sarana jasa telepon yang tersedia (1 Rekening x 12)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 rekening 12 rekening 12 rekening	160.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 rekening 12 rekening 12 rekening	160.000.000
6	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa kebersihan kantor dibayar		12 bulan	59.325.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 bulan	59.325.000
6	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen				100 Persen	411.484.750
6	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas roda 2 terpelihara Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang terbayar pajaknya Jumlah kendaraan dinas roda 4 terpelihara Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang terbayar pajaknya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 unit 8 unit 7 unit 7 unit	234.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 unit 8 unit 7 unit 7 unit	250.000.000
6	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah komputer yang terfasilitasi pemeliharaannya Jumlah laptop yang terfasilitasi pemeliharaannya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan,	2 unit 45 unit 2 unit	13.375.000	Dana Transfer Umum-Dana		2 unit 45 unit 2 unit	14.311.250

(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
						Jumlah printer yang terfasilitasi pemeliharaannya	Semua Kelurahan			Alokasi Umum			
6	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rehab pagar dan taman kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	450 meter	130.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		450 meter	130.000.000
6	01	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah AC yang terfasilitasi pemeliharaannya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 unit	16.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 unit	17.173.500
6	01	01	2,13		Penataan Organisasi	Nilai IKM PD		79,32	2.150.000			100 Persen	2.300.000
6	01	01	2,13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen RTP SPIP Jumlah dokumen SOP Jumlah dokumen Survei Kepuasan Masyarakat (IKM)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 dokumen 1 dokumen 2 dokumen	2.150.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 dokumen 1 dokumen 2 dokumen	2.300.000
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti		100 Persen	1.491.500.000			100 Persen	1.491.500.000
6	01	02	2,01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase hasil pengawasan internal ditindaklanjuti		100 Persen	625.500.000			100 Persen	625.500.000

(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6	01	02	2,01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah dan OPD yang direviu (KUA PAS murni dan perubahan, RKA murni dan perubahan dan Review BTT)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 dokumen	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		96 dokumen	150.000.000
6	01	02	2,01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah objek pemeriksaan reguler dan pemeriksaan kinerja Jumlah obyek Evaluasi tindak lanjut	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 auditan 4 dokumen	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		84 auditan 4 dokumen	150.000.000
6	01	02	2,01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Dokumen hasil reviu laporan keuangan Pemda Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah dan OPD yang direviu (RKPD murni dan perubahan; Renja murni dan perubahan)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen 4 dokumen	140.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen 4 dokumen	140.000.000
6	01	02	2,01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen review DAK dan review lainnya sesuai amanat pemerintah Kabupaten, Propinsi, dan Pusat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 dokumen	185.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		30 dokumen	185.500.000
6	01	02	2,02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase hasil pengawasan dengan tujuan tertentu ditindaklanjuti		100 Persen				100 Persen	866.000.000

(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6	01	02	2,02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah dokumen hasil Laporan pemeriksaan khusus Jumlah Dokumen Laporan Saber Pungli Jumlah dokumen tindak lanjut LHP BPK-RI sesuai rekomendasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 dokumen 1 dokumen 2 dokumen	866.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 dokumen 1 dokumen 2 dokumen	866.000.000
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase PD yang sudah melakukan manajemen risiko		100 Persen	413.100.000			100 Persen	414.010.000
6	01	03	2,01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan terlaksana		100 Persen	5.350.000			100 Persen	5.710.000
6	01	03	2,01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), Peta Pengawasan, Kendali Mutu Audit (KMA)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 dokumen	2.675.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 dokumen	2.850.000
6	01	03	2,01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dokumen kebijakan teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Jumlah Dokumen telaahan staf	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 dokumen 4 dokumen	2.675.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 dokumen 4 dokumen	2.860.000
6	01	03	2,02		Pendampingan dan Asistensi	Persentase pendampingan dan asistensi terlaksana		100 Persen	407.750.000			100 Persen	408.300.000

(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6	01	03	2,02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen hasil asistensi/ pendampingan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96 dokumen	400.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		96 dokumen	400.000.000
6	01	03	2,02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen evaluasi Whistle Blower System Jumlah Dokumen hasil evaluasi benturan kepentingan Jumlah Dokumen hasil evaluasi Zona Integritas (ZI), Wilayah Bebas Korupsi (WBK), Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Jumlah Dokumen laporan monev Korsupgah KPK Jumlah Dokumen monev gratifikasi Jumlah Dokumen monev PMPRB Jumlah hasil evaluasi maturitas SPIP	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 7 dokumen	7.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 7 dokumen	8.300.000
								TOTAL	10.103.479.936				10.527.826.093

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2022 merupakan arah pelaksanaan program dan kegiatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan sasaran daerah dengan memperhatikan prioritas pembangunan. Output Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2022 adalah Program Kerja Pengawasan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta sasaran daerah maupun sasaran PD.

Inspektorat sebagai pemilik fungsi pengendalian intern atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah senantiasa meningkatkan kualitas pengawasannya sehingga dapat mengurangi paparan risiko OPD dengan pola penyelenggaraan pengawasan berdasarkan manajemen risiko. Manajemen resiko berasal dari pemilihan program dan kegiatan masing-masing OPD yang memiliki risiko tertinggi dan digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan pengawasan berbasis risiko yang diusulkan dalam suplemen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan sasaran audit kinerja dalam rangka menjaga sinkronisasi dan konsistensi secara efektif, efisien dan ekonomis dalam mewujudkan visi misi Bupati terpilih.

Rencana Tindak Lanjut

1. Meningkatkan volume monitoring dan evaluasi melalui kegiatan-kegiatan rapat koordinasi teknis, pemanggilan obyek pemeriksaan dalam rangka pemantauan perkembangan penyelesaian temuan,
2. Melaksanakan asistensi/pendampingan percepatan penyelesaian tindak lanjut atas saran dan perbaikan terhadap pemeriksaan BPK-RI/APIP.
3. Melaksanakan asistensi terhadap 144 kalurahan di wilayah Kabupaten Gunungkidul dalam rangka penyusunan pertanggungjawaban APBKal dan rencana penyusunan APBKal tahun berikutnya.
4. Membuka layanan klinik konsultasi.
5. Melakukan Survei Penilaian Integritas.
6. Meningkatkan Kapasitas SDM, Sarana dan Prasarana.

Demikian Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2022 ini disusun untuk dijadikan pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran APBD Tahun 2022.



BUPATI GUNUNGKIDUL. ✕

SUNARYANTA ✕